



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: <b>III (tiga).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Sumut, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Tanjungpura, Universitas Bengkulu, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Mulawarman, Universitas Palangkaraya, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Syiah Kula dan Universitas Tadulako.
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 20 April 2020</b>
Pukul	: <b>10.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Virtual)
Pimpinan Rapat	: <b>Agustina Wilujeng Pramestuti/Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pandangan maupun kebijakan pendidikan terkait dampak Pandemi Covid-19. 2. Pemanfaatan penelitian di perguruan tinggi terkait dengan dampak Covid-19.
Hadir Komisi X DPR RI	: 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pembicara	: 1. Wakil Dekan Universitas Padjajaran Bapak Irvan Afriandi,dr., MPH., Dr.PH 2. Dekan UGM Bapak Prof.dr.Ova Emilia, Sp.OG(K), M.Med.Ed, 3. Plt. Direktur Utama UI Bapak Dr. dr. Sukamto, Sp.PD., K-AI 4. Direktur RSPTN UNHAS Bapak Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif

5. Direktur RS Universitas Airlangga Bapak Prof Dr. Nasronudin dr., Sp.PD-KPTI., FINASIM
6. Direktur Utama RS Universitas Sumut Bapak Dr. dr. Syah Mirsya Warli, SpU (K)
7. Direktur Utama RSND Universitas Diponegoro Bapak Dr. dr. Sutopo Patria Jati, MM., M.Kes
8. Rektor UNS Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum
9. Direktur Universitas Brawijaya Ibu Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes
10. Wakil Rektor Bidang Umum dan Kepegawaian Universitas Mataram Bapak Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
11. Direktur RS Universitas Udayana Bapak Dr. dr. Dewa Putu Gde Purwa Samatra, Sp.S (K)
12. Dekan FKM Universitas Andalas Bapak Defriman Djafri PhD
13. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Bapak dr. Muhammad Asroruddin, Sp.M
14. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu Bapak Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D
15. Dekan FK Universitas Jember dr. Supangat, M.Kes., Ph.D., Sp.BA
16. Dekan FK Universitas Jenderal Soedirman Dr. dr. Eman
17. Dekan Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. dr. Iwan Aflane, M.Kes, Sp.F, SH

## **I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Para Rektor/Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran Dan Direktur RS Pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri sesuai undangan DPR RI Nomor: PW/04907/DPR RI/IV/2020, tertanggal 8 April 2020, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Para Rektor/Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran Dan Direktur RS Pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri sesuai undangan DPR RI Nomor: PW/04907/DPR RI/IV/2020, tertanggal 8 April 2020 yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait dampak COVID-19 di perguruan tinggi, yang

substansinya bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dengan Kemendikbud RI. (*bahan paparan terlampir*).

2. Terhadap masukan dan paparan yang disampaikan oleh Para Rektor/Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran Dan Direktur RS Pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri sesuai undangan DPR RI Nomor: PW/04907/DPR RI/IV/2020, tertanggal 8 April 2020. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
  - a. Komisi X DPR RI meminta FK PTN dan RS Pendidikan/Akademik untuk memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, serta tidak menambah beban psikologis dan beban finansial mahasiswa.
  - b. Komisi X DPR RI mendorong Fakultas Kedokteran dan RS Pendidikan/Akademik dari PTN untuk terus mengembangkan penelitian di bidang kedokteran, farmasi dan kesehatan masyarakat terkait dengan Covid-19.
  - c. Komisi X DPR RI Mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemenkes RI, Kemenristek/BRIN RI dan K/L lainnya terkait kebijakan penelitian bidang kesehatan antara lain penelitian kolaboratif, hilirisasi hasil penelitian perguruan tinggi, akses penelitian di RS Pendidikan maupun RS Umum.
  - d. Komisi X DPR RI mendorong Fakultas Kedokteran dan RS Pendidikan/Akademik dari PTN untuk mengoptimalkan kontribusi penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan standar minimal tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - e. Mendorong Kemendikbud RI untuk mengkaji adanya payung hukum terkait beban biaya pendidikan kedokteran yang semakin tinggi terkait dengan adanya pandemi Covid-19.
  - f. Komisi X DPR RI mendorong FK dan RS Pendidikan/Akademik dari PTN memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pendidikan kedokteran, khususnya dalam hal implementasi kebijakan di masa Pandemi Covid-19, termasuk dalam hal belanja barang.
3. Komisi X DPR RI mendorong penguatan dan peningkatan kapasitas Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan, dan fakultas terkait, termasuk pengembangan penelitian dan peningkatan sarpras bidang kedokteran dalam percepatan penanganan COVID-19, menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan realokasi/pemotongan anggaran sebesar 4,9 triliun.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI membuat skema bantuan untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) antara lain melalui kerja sama dengan provider IT atau lembaga penyiaran public, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak memberikan beban psikologis, dan beban finansial kepada mahasiswa.
5. Komisi X DPR RI memastikan Kemendikbud RI memberikan insentif bagi peserta didik pendidikan kedokteran dan relawan dari perguruan tinggi yang terlibat dalam pelayanan/perawatan dan pemeriksaan laboratorium oleh RS Pendidikan PTN Badan Hukum dan PTN Non Badan Hukum.

6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI bekerjasama dengan Kemenkes RI untuk secepatnya menjamin pemenuhan standar keselamatan kerja dan standar keselamatan pasien secara berkesinambungan bagi tenaga kesehatan, khususnya para Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
7. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI bekerja sama dengan K/L terkait untuk membuat kebijakan dan sistem yang terintegrasi dalam bidang kedokteran, kesehatan dan farmasi untuk mendukung pengembangan pendidikan kedokteran, guna menjawab tantangan ke depan.
8. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk membuat skema pembiayaan dalam bentuk subsidi bagi mahasiswa yang membutuhkan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
9. Komisi X DPR RI meminta Para Rektor/Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran Dan Direktur RS Pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri sesuai undangan DPR RI Nomor: PW/04907/DPR RI/IV/2020, tertanggal 8 April 2020 untuk menyampaikan bahan tambahan/penjelasan tertulis lainnya, terkait dengan tanggapan, masukan, permintaan informasi dan pertanyaan anggota Komisi X DPR RI dan selanjutnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat pada hari Senin tanggal 27 April 2020 .

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB

**KETUA RAPAT,**



**AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI,SS**